

Transparansi Dana Penanggulangan Bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar

Ida Ayu Rysma Dewi*, Nyoman Ari Surya Darmawan

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* ayurisma445@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
27 Desember 2021

Tanggal diterima:
26 Juli 2022

Tanggal dipublikasi:
13 Agustus 2022

Kata kunci: *corona disease 2019 (covid-19);* pengelolaan dana desa; prinsip transparansi.

Pengutipan:

Dewi, Ida Ayu Rysma & Darmawan, Nyoman Ari Surya. (2022). Transparansi Dana Penanggulangan Bencana COVID-19 di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 174-185.

Keywords: *corona disease 2019 (covid-19);* management of village funds; principles of transparency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dana penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan yaitu Prinsip – Prinsip Transparansi yang merujuk pada (Andrianto, 2007). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 64 Desa dan 6 Kelurahan dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar dengan sampel sebanyak 120 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form dan diukur menggunakan Skala Likert. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, transparansi dana penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar belum terlaksana dengan maksimal, hal ini ditunjukkan pada pengelolaan dana desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Gianyar bersifat transparan.

Abstract

This study aimed at investigating the transparency of Coronavirus disaster relief fund in Gianyar district. Principles of transparency were used in this study as the variables that refers to (Andrianto, 2007). Quantitative method was used in this study with the population of 64 villages and 6 urban villages from 7 sub-districts in Gianyar district. The samples of this study were 120 participants who were selected by using purposive sampling. Primary data was used and the data were collected by using Google Form that is measured by using Five-point Likert Scale. SPSS 20 was used in this study to analyze the multiple linear analysis. The results of this study showed that. The transparency of Coronavirus disaster relief fund in Gianyar district is not conducted optimally. This is showed by the management of village funds that have not fully implemented the principle of transparency. Therefore, the management of village funds in Gianyar only can be said as transparent.

Pendahuluan

Tahun 2020, masyarakat dunia dihebohkan dengan munculnya wabah penyakit yang merebak di Tiongkok China kemudian diketahui sebagai Virus Corona atau dalam bahasa ilmiah kedokteran disebut Virus Corona Disease 2019 (Covid-19). Virus ini diketahui menyebar pertama kali pada bulan Desember Tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok China. Kasus Virus Corona di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020 dan

diumumkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Untuk dapat mengatasi penyebaran Virus Corona tersebut, pemerintah melakukan kebijakan seperti menetapkan bahwa wabah virus Covid-19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI No. 2 Tahun 2020, melakukan jaga jarak (social distancing), dan menghindari kerumunan sehingga Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah tertentu (Hukum, 2020).

Melalui kebijakan tersebut tentunya berdampak pada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Karena interaksi-interaksi yang dibatasi, maka berdampak besar pada aktivitas perekonomian di kehidupan masyarakat. Keputusan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan dalam (Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, 2020). Di lingkungan pemerintahan daerah, Permendagri yang dikeluarkan merupakan sebuah tindak lanjut dari pemerintahan pusat untuk dapat mengambil langkah lebih lanjut dalam mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan yang dikeluarkan ini memberikan landasan kepada pemerintah daerah untuk mengubah alokasi dana APBD sebelumnya untuk penanganan Covid-19.

Selain di daerah, jangka panjang dari efek pandemi Covid-19 ini tentu akan di rasakan di desa. Alhasil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19

Ketika pandemi ini merebak dan menyebabkan seluruh bagian masyarakat terkena dampak penurunan ekonomi yang drastis terlebih pada masyarakat desa, maka pengalihan APBDes yang sebelumnya untuk pemerataan pembangunan diambilalih untuk percepatan penanganan Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi Covid-19 dan program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola (Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, 2020). Di Tahun 2021 ini, Menteri Desa (Mendes) menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 72 Triliun.

Namun, penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah kerap kali disalahgunakan oleh oknum pejabat negara. Seperti pada halnya kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara pada 6 Desember 2020. Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp 17 Miliar dari rekanan pengadaan sembako bansos untuk warga Jakarta. Per bulan, nilai bansos tersebut sebesar Rp 600.000 dan dibagi menjadi dua paket setiap dua minggu sekali senilai Rp 300.000. Pelaksanaan proyek tersebut disepakati oleh keduanya dengan adanya fee pada tiap-tiap paket sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000. (Lidyana, 2020).

Selain di Ibu Kota Jakarta, Korupsi juga terjadi di Bali tepatnya di Kabupaten Buleleng. Bulan Februari 2021 yang lalu, Kepala Dinas Pariwisata menjadi tersangka korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang pariwisata 2020. Dana PEN yang dikorupsi menghasilkan kerugian negara mencapai Rp 656 juta. Dugaan korupsi yang dilakukan setelah Kepala Dinas Pariwisata Buleleng memimpin rapat pembahasan alokasi dana PEN 2020 tersebut dengan modus mark up biaya hotel dan akomodasi. Misalnya biaya hotel berkisar Rp 550.000 dinaikkan menjadi Rp 1 juta. Kepala Dinas (Kadis) ini juga memerintahkan bawahannya untuk mencari uang kesejahteraan (Rosidin, 2020).

Dari kasus korupsi tersebut, pentingnya melakukan pengoptimalan terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara.

Transparansi merupakan sebuah prinsip yang menjamin akses bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai. Transparansi juga merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat atau publik tentang informasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas penyelenggaraan pemerintahan (Setiyanningrum, 2017). Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan Good Governance dalam halnya pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik yaitu akuntabel, transparan,

partisipatif dan dilakukan dengan penuh ketertiban dan kedisiplinan anggaran. Dalam anggaran tersebut tentu partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya kebijakan yang menyimpang sehingga menimbulkan tindakan berlaku curang (Saputra et al., 2018). Prinsip terpenting dari Good Governance yaitu adanya transparansi. Transparansi merupakan keterbukaan badan organisasi atau kelompok dalam memberikan informasi secara material, relevan dengan pengaksesan yang mudah dipahami bagi pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Selain itu, pemerataan informasi juga penting dalam membangun pemerintahan yang berlandaskan transparansi, sehingga pemerintah pusat menerapkan pendekatan desentralisasi yang berarti pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang pemerintah daerah (Widiartana & Darmawan, 2020). Pengoptimalan prinsip-prinsip transparansi dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara tentu berdampak baik terhadap kemajuan negara itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh (Andrianto, 2007) yaitu terbuka, diketahui masyarakat luas, keputusan yang diambil melibatkan masyarakat dan adanya aspirasi dari masyarakat desa,

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengoptimalan dalam penyelenggaraan publik secara umum, pengoptimalan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat merupakan suatu wujud pelayanan badan-badan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Yusran et al., 2015).

Salah satu syarat prinsip-prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah adanya keterbukaan dan kebebasan akses informasi publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat publik dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga dapat mewujudkan pemerintahan terbuka (Open Governance). Maksud dari pemerintahan terbuka disini ialah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris (Yusran et al., 2015).

Diketahui masyarakat luas yang dimana informasi yang didapatkan masyarakat dapat diakses dengan mudah tanpa membedakan status sosial masyarakat itu sendiri sehingga kemudahan akses informasi memberikan keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Akses informasi yang mudah tentu dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat desa, nantinya masyarakat akan membantu mengawasi kinerja-kinerja dari pemerintahan desa dalam melayani masyarakat untuk dapat mewujudkan keterbukaan pengelolaan keuangan yang baik, toleran, dan transparan.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip transparansi yang menjadi sesuatu hal yang dapat mempengaruhi proses pengoptimalan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat sangat penting kehadirannya dalam penyampaian pendapat sehingga pelaksanaan program kerja yang dilakukan pemerintah desa lebih tepat sasaran pada masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat baik individu ataupun kelompok dalam mewujudkan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagai bentuk tindakan yang berkontribusi pada pikiran, waktu, energi, pengalaman, modal dan/ atau bahan serta partisipasi dalam penggunaan dan penggunaan hasil dari pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat merupakan bentuk perwujudan program dari pemerintahan desa yang mandiri dengan dukungan masyarakat yang kreatif sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan semua pihak.

Wujud dari prinsip transparansi yang terakhir yaitu adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat. Masyarakat desa dapat mengajukan ide-ide atau pendapatnya dalam pengembangan pembangunan desa. Ide-ide atau aspirasi masyarakat menurut (Nurhakiki, 2016) merupakan sebuah gagasan atau konsep yang diberikan oleh masyarakat desa kemudian ditampung berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh forum resmi maupun non resmi yang disampaikan dalam bentuk usulan, kritikan, dan pengaduan kepada lembaga yang bertanggungjawab dalam menampung aspirasi masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis elemen dari prinsip transparansi yaitu Keterbukaan Informasi Publik, Diketahui Masyarakat Luas, Keterlibatan Masyarakat, Aspirasi masyarakat, terhadap Pengelolaan Dana Desa yang sebagai dana penanggulangan

bencana Covid-19 yang dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Gianyar yang dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gianyar

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Sukawati	12
2.	Gianyar	17
3.	Tegallalang	7
4.	Payangan	9
5.	Tampaksiring	8
6.	Ubud	8
7.	Blahbatuh	9
	JUMLAH	70

Peneliti menggunakan objek tersebut karena Kabupaten Gianyar merupakan salah satu wilayah yang banyak terdapat wisata dan mayoritas penduduknya adalah pelaku kesenian. Kabupaten Gianyar banyak terdapat usaha-usaha kesenian yang dikelola oleh individu atau pribadi seperti salah satunya yaitu pengrajin patung, ukiran-ukiran kayu dan kerajinan-kerajinan lainnya yang reputasinya sudah tersebar hingga ke mancanegara. Oleh karena itu, ketika pandemi Covid-19 ini merebak pelaku-pelaku kesenian ini banyak yang kehilangan penghasilan dari usaha-usaha kesenian milik pribadi atau UMKM yang ada di Gianyar dan otomatis kebutuhan ekonominya jauh berkurang. Selain itu, Kabupaten Gianyar merupakan salah satu opsi pemerintah untuk pemulihan pariwisata di Bali dalam masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol new normal destination.

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa/Lurah setempat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) dan salah satu masyarakat desa yang terdampak bencana Covid-19. Maka, dalam setiap desa/kelurahan akan diambil tiga (3) responden.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H₁ : Keterbukaan Informasi Publik (X1) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.
H₂ : Diketahui Masyarakat Luas (X2) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.
H₃ : Keterlibatan Masyarakat (X3) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.
H₄ : Aspirasi Masyarakat (X4) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan angka-angka sebagai hasil yang diperoleh dari penelitian untuk dapat menjelaskan fenomena terhadap kejadian yang terjadi di lapangan.

Sumber informasi dalam penelitian ini berupa data yang diolah dengan model regresi linier berganda yang dimana pengumpulan data dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan bantuan program SPSS. Adapun sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini yaitu 64 Desa dan 6 Kelurahan dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan deskripsi umum hasil penelitian untuk masing – masing variable.

Table 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KIP (X1)	120	3,00	15,00	13,2667	2,09334
DML (X2)	120	4,00	20,00	14,9000	1,93768
KM (X3)	120	10,00	29,00	16,4333	2,68433
AM (X4)	120	3,00	15,00	13,2583	1,86293
Valid N (listwise)	120				

Sumber: data diolah penulis,2021

Berdasarkan table diatas, data Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mempunyai nilai terkecil sebesar 3, nilai terbesar sebesar 15, dan nilai mean sebesar 13,26. Ini berarti bahwa dari 3 butir pernyataan kuesioner mengenai keterbukaan informasi publik (KIP) untuk 120 responden dengan nilai Std. Deviation sebesar 2,093. Nilai Std. Deviation menjelaskan terjadi perbedaan nilai keterbukaan informasi publik terhadap Mean sebesar 2,093. Skor terbesar pada variabel keterbukaan informasi publik sebesar 15 dengan jumlah pernyataan 3 butir, hal ini berarti jawaban responden sebagian besar sangat setuju dengan skor 5.

Data Diketahui Masyarakat Luas (DML) mempunyai nilai terkecil sebesar 4, nilai terbesar sebesar 20, dan nilai mean sebesar 14,90. Ini berarti bahwa dari 4 butir pernyataan kuesioner mengenai Diketahui Masyarakat Luas (DML) untuk 120 responden dengan nilai Std. Deviation sebesar 1,937. Nilai Std. Deviation menjelaskan terjadi perbedaan nilai diketahui masyarakat luas terhadap Mean sebesar 1,937. Skor terbesar pada variabel diketahui masyarakat luas sebesar 20 dengan jumlah pernyataan 4 butir, hal ini berarti jawaban responden sebagian besar sangat setuju dengan skor 5.

Data Keterlibatan Masyarakat (KM) mempunyai nilai terkecil sebesar 10, nilai terbesar sebesar 29, dan nilai mean sebesar 16,43. Ini berarti bahwa dari 6 butir pernyataan kuesioner mengenai keterlibatan masyarakat (KM) untuk 120 responden dengan nilai Std. Deviation sebesar 2,684. Nilai Std. Deviation menjelaskan terjadi perbedaan nilai keterlibatan masyarakat terhadap Mean sebesar 2,684. Skor terbesar pada variabel keterlibatan masyarakat sebesar 29 dengan jumlah pernyataan 6 butir, hal ini berarti jawaban responden sebagian besar setuju dan sangat setuju dengan skor 4 dan 5.

Data Aspirasi Masyarakat (AM) mempunyai nilai terkecil sebesar 3, nilai terbesar sebesar 15, dan nilai mean sebesar 13,25. Ini berarti bahwa dari 3 butir pernyataan kuesioner mengenai Aspirasi Masyarakat (AM) untuk 120 responden dengan nilai Std. Deviation sebesar 1,862. Nilai Std. Deviation menjelaskan terjadi perbedaan nilai aspirasi masyarakat terhadap Mean sebesar 1,862. Skor terbesar pada variabel aspirasi masyarakat sebesar 15 dengan jumlah pernyataan 3 butir, hal ini berarti jawaban responden sebagian besar sangat setuju dengan skor 5.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut berarti $\geq 0,05$ dalam pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data pada penelitian ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai $\geq 0,05$ atau sebesar 0,200.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF pada semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai < 10 dan nilai Tolerance untuk semua variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai $> 0,10$. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yang ada pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Table 3. Tabel *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.77726779
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.061
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data diolah penulis, 2021

Table 4. Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1.	Keterbukaan Informasi Publik (X1)	0,782	1,279	Tidak terjadi multikolinearitas
2.	Diketahui Masyarakat (X2)	0,382	2,616	Tidak terjadi multikolinearitas
3.	Keterlibatan Masyarakat (X3)	0,395	2,531	Tidak terjadi multikolinearitas
4.	Aspirasi Masyarakat (X4)	0,756	1,323	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data diolah penulis, 2021

Table 5. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.980	1.197		2.490	.014
	Keterbukaan Informasi Publik (X1)	-.431	.300	-.459	-1.436	.154
	Diketahui Masyarakat Luas (X2)	.092	.370	.098	.249	.804
	Keterlibatan Masyarakat (X3)	.029	.436	.031	.068	.946
	Aspirasi Masyarakat (X4)	-.118	.319	-.118	-.370	.712

Sumber: data diolah penulis, 2021

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 5, diketahui nilai Sig. keterbukaan informasi publik (X1) sebesar 0,154, diketahui masyarakat luas (X2) sebesar 0,804, keterlibatan masyarakat (X3) sebesar 0,946 dan aspirasi masyarakat (X4) sebesar 0,712 dengan absolute residual > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan dari semua variabel bebas dalam penelitian ini dinyatakan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Table 6. Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.037	1.428		4.227	.000
	TX1	-.058	.165	-.044	-.354	.724
	TX2	.772	.152	.668	5.068	.000
	TX3	-.151	.067	-.235	-2.250	.026
	TX4	.574	.138	.383	4.156	.000

Sumber: data diolah penulis, 2021

Table 7. Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	6,037	1.428		4.227	.000
	Keterbukaan Informasi Publik (X1)	-.058	.165	-.044	-.354	.724
	Diketahui masyarakat (X2)	.772	.152	.668	5.068	.000
	Keterlibatan Masyarakat (X3)	-.151	.067	-.235	-2.250	.026
	Aspirasi masyarakat (X4)	.574	.138	.383	4.156	.000

Sumber: data diolah penulis, 2021

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

$$Y = 6,037 - 0,058 X1 + 0,772 X2 - 0,151 X3 + 0,574 X4 + \epsilon$$

1. Konstanta 6,037 menunjukkan jika variabel Keterbukaan Informasi Publik (X1), Diketahui Masyarakat Luas (X2), Keterlibatan Masyarakat (X3), dan Aspirasi Masyarakat (X4) bernilai konstan, maka variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) memiliki nilai positif 6,037 satuan.
2. Variabel Keterbukaan Informasi Publik (X1) memiliki koefisien negatif -0,058 artinya bahwa Keterbukaan Informasi Publik (X1) berpengaruh negatif terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y). Ini menunjukkan setiap kenaikan satu satuan Keterbukaan Informasi Publik (X1) dapat menurunkan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar -0,058 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
3. Variabel Diketahui Masyarakat Luas (X2) memiliki koefisien positif 0,772 artinya bahwa Diketahui Masyarakat Luas (X2) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y). Ini menunjukkan setiap kenaikan satu satuan Diketahui Masyarakat Luas (X2) dapat meningkatkan Pengelolaan Dana
4. Desa (Y) sebesar 0,772 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
5. Variabel Keterlibatan Masyarakat (X3) memiliki koefisien negatif -0,151 artinya bahwa Keterlibatan Masyarakat (X3) berpengaruh negatif terhadap Pengelolaan

Dana Desa (Y). Ini menunjukkan setiap kenaikan satu satuan Keterlibatan Masyarakat (X3) dapat menurunkan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar -0,151 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

6. Variabel Aspirasi Masyarakat (X4) memiliki koefisien positif 0,574 artinya bahwa Aspirasi Masyarakat (X4) berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y). Ini menunjukkan setiap kenaikan satu satuan Aspirasi Masyarakat (X4) dapat meningkatkan Pengelolaan Dana Desa (Y) sebesar 0,574 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

Uji Statistik t

Berikut merupakan hasil uji T yang disajikan dalam Tabel 7. Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka berdasarkan Tabel 7 hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) Keterbukaan informasi publik (KIP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa (PDD). Hasil ini ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,058 dengan t-statistics = -0,354 dan signifikan (p) = 0,724 > 0,05, sehingga hipotesis 1 (H_1) ditolak dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik sudah terlaksana, namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan apa yang sudah terlaksana oleh perangkat desa. dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang disampaikan oleh perangkat desa khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil. (

Diketahui masyarakat luas (DML) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (PDD). Hasil ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,772 dengan t-statistics = 5,068 dan signifikansi (p) = 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis 2 (H_2) diterima dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat Diketahui Masyarakat Luas akan meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana Covid-19 Di Kabupaten Gianyar.

Keterlibatan masyarakat (KM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (PDD). Hasil ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -0,151 dengan t- t-statistics = -2.250 dan signifikansi (p) = 0,026 < 0,05, sehingga hipotesis 3 (H_3) ditolak dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil menunjukkan bahwa perangkat desa sudah melaksanakan prinsip transparansi khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat. Namun, fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan antusias masyarakat desa masih kurang optimal untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. (4) Aspirasi masyarakat (AM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (PDD). Hasil ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,574 dengan t-statistics = 4.156 dan signifikansi (p) = 0,000 < 0,05, sehingga hipotesis 4 (H_4) diterima dan dapat dibuktikan secara empiris. Hasil menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat Aspirasi Masyarakat akan meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar.

Uji F (Uji Simultan)

Berikut merupakan hasil uji F yang disajikan dalam Tabel 8. Sesuai dengan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 8, hasil analisis menunjukkan besarnya nilai f yaitu 38,477 dengan nilai signifikansi = 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara serempak variabel keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Table 8. Uji F (Uji Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	371.623	4	92.906	38.477	.000 ^b
Residual	277.677	115	2.415		
Total	649.300	119			

Sumber: data diolah peneliti, 2021

Table 9. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.757 ^a	.572	.557	1.55389

Sumber: data diolah penulis, 2021

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berikut hasil uji koefisien determinasi yang disajikan dalam Tabel 9. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,557. Hal ini menunjukkan bahwa 55,7% variabel pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh variabel keterbukaan informasi publik, diketahui masyarakat luas, keterlibatan masyarakat, dan aspirasi masyarakat, sedangkan 44,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang memengaruhi pengelolaan dana desa itu sendiri diluar dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menguji transparansi dana penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar. Dengan meneliti pengaruh Keterbukaan Informasi Publik, Diketahui Masyarakat Luas, Keterlibatan Masyarakat, dan Aspirasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. adapun hasil pengujian tersebut adalah: (1) Keterbukaan informasi publik (KIP) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa (PDD). Hasil menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik sudah terlaksana, namun fakta yang terjadi di lapangan tidak sejalan dengan apa yang sudah terlaksana oleh perangkat desa. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang disampaikan oleh perangkat desa khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil. Hal ini bisa saja terjadi karena kurang efektifnya sarana dan prasarana informasi sehingga dalam pengelolaan dana desa terkait dengan penanggulangan bencana Covid-19 menjadi terhambat. Mulai dari sinyal yang terhambat, website yang tidak lengkap dengan informasi, serta banyaknya perangkat desa dalam melayani masyarakat kurang memahami tentang teknologi informasi yang tentunya akan berkembang disetiap jamannya belum lagi data yang disajikan tidak lengkap sehingga respon ke masyarakat menjadi terlambat.

Semakin berkembangnya teknologi informasi dalam memberikan akses keterbukaan informasi bagi masyarakat desa untuk mendapat pelayanan dari pemerintah desa yang dimana tidak didukung oleh perangkat desa dalam pelayanan kepada masyarakat karena kurang memahami dengan perkembangan teknologi, akan menghasilkan penurunan pengelolaan dana desa yang digunakan dalam menanggulangi bencana Covid-19.

Dalam teori stakeholder kepentingan bukan hanya diberikan kepada satu entitas namun ke berbagai pihak. Hal ini dimaksudkan dengan keterbukaan informasi yang kurang memadai tentunya tidak memberikan manfaat kepada entitas lain karena kurangnya pengoptimalan dalam memaksimalkan teknologi informasi yang ada. Hasil ini tidak sejalan

dengan penelitian dari (F & Kurniawan, 2017); (Yusran et al., 2015) yang menyatakan adanya keterbukaan informasi publik akan meningkatkan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa (2) Diketahui masyarakat luas (DML) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (PDD). Hasil menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat Diketahui Masyarakat Luas akan meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana Covid-19 Di Kabupaten Gianyar. Semakin tinggi informasi yang diketahui masyarakat luas maka semakin baik pula pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Murma'inah & Ati, 2013) yang menyatakan kemudahan informasi akan memberikan kesejahteraan hidup, solusi permasalahan, dan memudahkan serta memberikan kehidupan yang lebih terjamin, maka dari itu pengelolaan dana desa tentu diketahui publik dengan dimudahkannya informasi mengenai hal-hal penggunaan dana dalam penanggulangan bencana sehingga menjadi solusi permasalahan yang sedang melanda masyarakat di tengah kondisi bencana. (3) Keterlibatan masyarakat (KM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (PDD). Hasil menunjukkan bahwa perangkat desa sudah melaksanakan prinsip transparansi khususnya dalam hal keterlibatan masyarakat. Namun, fakta yang terjadi dilapangan menunjukkan antusias masyarakat desa masih kurang optimal untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Seperti yang diketahui, penyaluran dana penanggulangan bencana Covid-19 sangat penting adanya. Ini dikarenakan didalam situasi ekonomi yang sesulit ini, masyarakat sebagai target dari penyaluran dana tentunya sangat membutuhkan bantuan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya usaha baik dari pihak perangkat desa maupun masyarakat untuk saling memiliki kesadaran akan pentingnya keterlibatan dari masing-masing pihak dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan dana desa agar prinsip transparansi dapat tercapai. Selain dapat mencapai prinsip transparansi, masyarakat khususnya akan merasakan manfaat yang lebih karena sudah terlibat dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dilain sisi, perangkat desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat karena sudah terjadinya prinsip transparansi yaitu keputusan yang melibatkan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ultafiah, 2017) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan yang dilakukan oleh (Aryani et al., 2020); (Fitrianda et al., 2020); (Reza, 2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. terjadinya perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi karena perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang dalam hal ini setiap kelompok masyarakat desa yang ada di masing-masing daerah memiliki kesadaran yang berbeda untuk dapat terlibat dalam setiap pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran desa yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa. (4) Aspirasi masyarakat (AM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (PDD). Hasil menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat Aspirasi Masyarakat akan meningkatkan transparansi terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar. Aspirasi masyarakat merupakan sebuah gagasan dari masyarakat yang mendiami salah satu wilayah, aspirasi yang dikemukakan tersebut akan ditampung yang berisikan mengenai keinginan dan kebutuhan masyarakat. Tingkat aspirasi masyarakat tercermin dalam bentuk usulan, kritikan, dan pengaduan dari masyarakat desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Handayani, 2021); (Nurhakiki, 2016) yang menatakan aspirasi msyarakat merupakan langkah awal dan gambaran masyarakat dengan pemerintah desa untuk membuat kebijakan, membangun potensi desa serta pembangunan desa dengan ciri khas dari desa itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aspirasi yang disampaikan masyarakat akan memberikan pengelolaan dana desa yang baik untuk kemajuan desa di masa yang mendatang dan memberikan kesejahteraan masyarakat desa

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang sebelumnya telah dibahas adapun simpulan hasil pembahasan sebagai berikut:

Maka dari itu, pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Gianyar hanya bersifat transparan. Hal ini dikarenakan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gianyar belum memenuhi prinsip-prinsip transparansi yang meliputi Keterbukaan Informasi Publik, Diketahui Masyarakat Luas, Keterlibatan Masyarakat, dan Aspirasi Masyarakat. Karena menurut (Andrianto, 2007), pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi untuk dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan korupsi, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan sehingga dari masyarakat desa juga dapat mengukur kinerja pemerintah desa dalam memberikan peningkatan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun saran-saran dari peneliti terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi pemerintah desa/lurah di Kabupaten Gianyar perlu meningkatkan prinsip-prinsip transparansi untuk dapat mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dana bantuan bencana yang sebelumnya pernah terjadi di Ibu Kota Jakarta dan di Kabupaten Buleleng. Dengan meningkatkan prinsip-prinsip transparansi akan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah dengan harapan menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Bagi Masyarakat Desa Di Kabupaten Gianyar harapannya lebih jeli melihat informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa sehingga mampu memberikan manfaat yang layak dan sesuai dengan keadaan desa setempat. Keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam mengukur kinerja pemerintah sangat diperlukan. Masyarakat diharapkan mengikuti musyawarah dan aktif untuk memberikan kontribusinya terhadap setiap keputusan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama sehingga prinsip-prinsip transparansi dapat terwujud dengan baik sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

Dan Peneliti Selanjutnya yang ingin meneliti mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa terkait dalam bidang bencana diharapkan untuk menambah variabel lain. Dengan tujuan untuk memperoleh kekuatan hubungan yang lain dan lebih diperjelas mengenai variabel yang mampu memberikan pengelolaan keuangan yang bersifat transparan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi.

Daftar Rujukan

- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing.
- Aryani, N. P. D. E., Werastuti, D. N. S., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(2), 179–194.
- F, A. G., & Kurniawan, R. (2017). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar). *RES Publica*, 1(3), 41–56.
- Fitrinanda, D., Linda, & Lautania, M. F. (2020). Pengaruh Kompetensi Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 2(2), 92–112. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i2.871>
- Handayani, Y. (2021). Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat pada Proses Pelaksanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 6.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, (2020).
- Lidyana, V. (2020). *Geger di Akhir Tahun, Korupsi Bansos Corona Terkuak*. Detik Finance.

- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5316714/geger-di-akhir-tahun-korupsi-bansos-corona-terkuak/1>
- Murma'inah, N., & Ati, S. (2013). Kebutuhan Informasi Masyarakat Desa Hutan Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(4), 38–51. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/view/32107/19692>
- Nurhakiki, A. (2016). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)*. Universitas Lampung.
- Reza, E. M. (2018). *Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rosidin, I. (2020). *Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Diduga Jadi Dalang Kasus Korupsi Dana Hibah PEN*. Regional Kompas. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/22/17193571/kepala-dinas-pariwisata-buleleng-diduga-jadi-dalang-kasus-korupsi-dana-hibah?page=all>
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41. <https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p28-41>
- Setiyaningrum, I. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan Konsep Value for Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta* [Universitas Negeri Yogyakarta]. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/9774>
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa di kecamatan merapi barat kabupaten lahat. In *Universitas Muhammadiyah Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Widiartana, I. G. N. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Good Governance di Desa Adat Banjar: Transparansi Dana Krama Tamiu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 307–315.
- Yusran, A., Sadik, N., & Hasrullah. (2015). Hubungan antara Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan Peningkatan Penerbitan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4(1), 21–40. <https://www.neliti.com/id/publications/108215/teori-teori-adaptasi-antar-budaya>